



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

2021

JULI 2021

# ANALISIS

*Berita dan Pendapat Masyarakat*



**Biro Humas dan Informasi Publik**

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu  
Jaksel 12550 Telp ( 021 ) 7806131, Ext. 2303,2308

Email : [humas-ip@pertanian.go.id](mailto:humas-ip@pertanian.go.id)



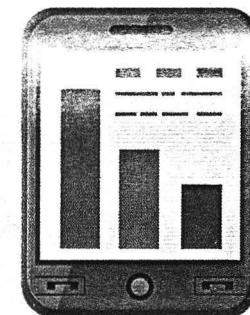
KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

2021

JULI 2021

# ANALISIS

*Berita dan Pendapat Masyarakat*



**Biro Humas dan Informasi Publik**

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu  
Jaksel 12550 Telp ( 021 ) 7806131, Ext. 2303,2308

Email : [humas-ip@pertanian.go.id](mailto:humas-ip@pertanian.go.id)



## PRAKATA

Analisis Berita dan Pendapat Masyarakat disusun sebagai upaya untuk memonitor dan menganalisis isu-isu yang terkait dengan sektor pertanian secara umum, maupun pada Kementerian Pertanian secara khusus. Monitoring dan analisis media cetak dilakukan secara swakelola, sedangkan analisis media elektronik/televisi dilakukan bekerjasama dengan pihak ke tiga. Tujuan penyusunan laporan adalah untuk mengevaluasi dan menyiapkan informasi serta bahan masukan dalam upaya antisipasi dan strategi kehumasan agar isu tidak berkembang menjadi krisis.

Topik yang hangat berkembang bulan ini yaitu Kementerian Pertanian (Kementan) telah merumuskan lima program pembangunan pertanian. Hal itu untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan lima program tersebut yaitu Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Dukungan Manajemen. "Saya minta kepada seluruh direktur jenderal (dirjen), kepala badan, serta kepala daerah tetap fokus dalam menjalankan program-program pertanian untuk memperkuat sektor pertanian dan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi saat ini," ujarnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional tahun 2021 (Musrenbangtan) secara virtual, Rabu 21 Juli 2021. Syahrul menegaskan, di tengah turbulensi ekonomi dan ancaman krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19, Kementan akan terus mengawal dan menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. "Yang tidak boleh salah dan terganggu sama sekali adalah menyediakan dan mengawal ketersediaan pangan bagi 270 juta rakyat Indonesia

Dengan adanya analisis dari media cetak dan elektronik selama satu bulan, maka diharapkan analisis berita dan pendapat umum ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak di lingkup Kementerian Pertanian.

Jakarta, Juli 2021

**Humas dan Informasi Publik  
Kementerian Pertanian**





## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Metode Kajian .....	2
<b>II. ANALISIS MEDIA CETAK</b> .....	<b>3</b>
2.1. Rekapitulasi Berita .....	3
2.2. Kategori Nilai Berita .....	4
<b>III. ANALISIS MEDIA ELEKTRONIK /TELEVISI (TV)</b> .....	<b>5</b>
3.1. Monitoring Media Televisi .....	5
3.2. Kategori Nilai Berita di Televisi .....	6
<b>IV. TOPIK TERSOROT</b> .....	<b>7</b>
4.1. Topik Tersorot di Media Cetak .....	7
4.2. Topik Tersorot di Media Elektronik .....	8



<b>V. TREN ISU TERSOROT .....</b>	<b>9</b>
5.1. Latar Belakang Isu .....	9
5.2. Komentar .....	11
5.3. Tindak Lanjut .....	13
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>14</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1. Jumlah ekspos berita pertanian di media televisi Juli 2021 .....	5
Tabel 2. Topik tersorot di media cetak .....	7
Tabel 3. Topik tersorot di media elektronik/Televisi (TV) .....	8





## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, komunikasi dan informasi yang berkembang pesat, maka seiring juga dengan membanjirnya arus informasi baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Dengan terbukanya informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat saat ini dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai aspek pembangunan. Demikian pun pada aspek pembangunan pertanian.

Pangan sebagai kebutuhan mendasar manusia merupakan isu yang sangat sensitif diberitakan baik oleh masyarakat maupun di berbagai media. Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian, seringkali dipojokkan oleh pemberitaan di media massa. Sehubungan dengan keadaan tersebut, perlu adanya pengawalan terhadap informasi yang berkembang di media serta melakukan analisis terhadap isu yang beredar berlarut-larut di media massa. Hal ini diperlukan terutama dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana suatu isu telah beredar luas di masyarakat.

Dalam menganalisa berita ini tidak hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan pertanian yang telah ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk lebih produktif mengakses informasi baik berita yang bersifat positif maupun negatif dari berbagai referensi dan sumber lain. Demikianpun juga tidak tertutup kemungkinan terhadap terus berkembangnya isu-isu mengenai pembangunan pertanian di berbagai media baik cetak, dan elektronik/televise. Analisis bulanan ini datanya bersumber dari media massa yang terbit di ibukota dan daerah sebanyak 24 media cetak, dan 17 media elektronik/Televise.

Melalui kegiatan analisis ini, diharapkan dapat memperoleh informasi berupa uraian suatu isu yang obyektif dari masyarakat, sehingga dapat menjadi masukan bagi pimpinan Kementerian Pertanian dalam menetapkan kebijakan pembangunan pertanian selanjutnya.



## 1.2. Tujuan

- a. Mengetahui nilai berita selama sebulan dari 24 media cetak dan 17 media elektronik/televisi;
- b. Mengetahui isu terhangat dalam sebulan;
- c. Menguraikan top isu dalam periode waktu sebulan, sejauh mana isu berkembang, serta tindak lanjutnya.

## 1.3. Metode Kajian

Kegiatan Analisa Berita dan Pendapat Masyarakat merupakan suatu kajian atas sebuah isu yang hangat setiap bulannya. Objek kajian dalam kegiatan ini adalah berita-berita terkait isu yang termuat dalam kliping berita dan pendapat pertanian dari media cetak serta hasil monitoring media elektronik/televisi.

Kegiatan dilaksanakan dengan urutan prosedur:

- Merumuskan nilai berita berdasarkan berita dan pendapat di media massa yang terkait dengan Kementerian Pertanian;
- Merumuskan permasalahan berdasarkan berita-berita ataupun pendapat yang terkait dengan isu;
- Mengumpulkan pernyataan-pernyataan terkait isu yang muncul di media massa;
- Merumuskan tindak lanjut berdasarkan solusi permasalahan yang disampaikan oleh pimpinan maupun stakeholder melalui media massa;
- Menggandakan, menjilid dan mendistribusikan kepada jajaran pimpinan lingkup Kementerian Pertanian dan pihak lain yang membutuhkan informasi.

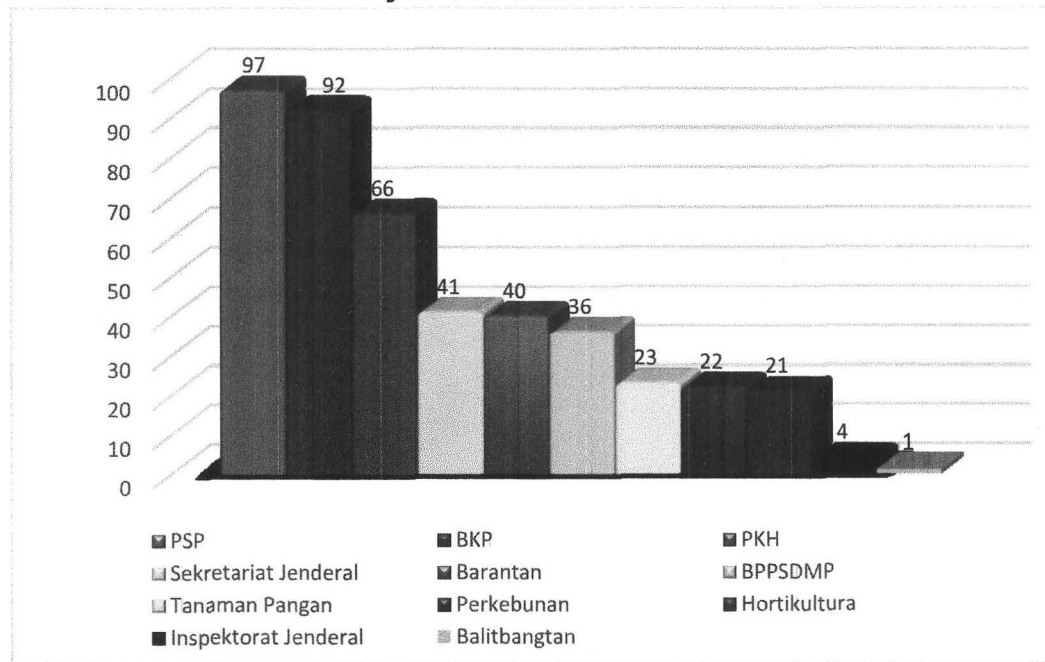


## II. ANALISIS MEDIA CETAK

### 2.1. Rekapitulasi Berita

Selama periode 1 – 31 Juli 2021 terdapat sebanyak 472 berita terkait sektor pertanian, yang diambil dari sumber 27 media cetak dengan rincian sebagaimana tersaji pada Grafik 1.<sup>1</sup> Dari data tersebut, terlihat 3 (tiga) subsektor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan, yaitu:

1. **Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 97 berita.**
2. **Ketahanan Pangan sebanyak 92 berita.**
3. **Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 66 berita.**



**Grafik 1. Rekapitulasi Berita Terkait dengan Sektor Pertanian**

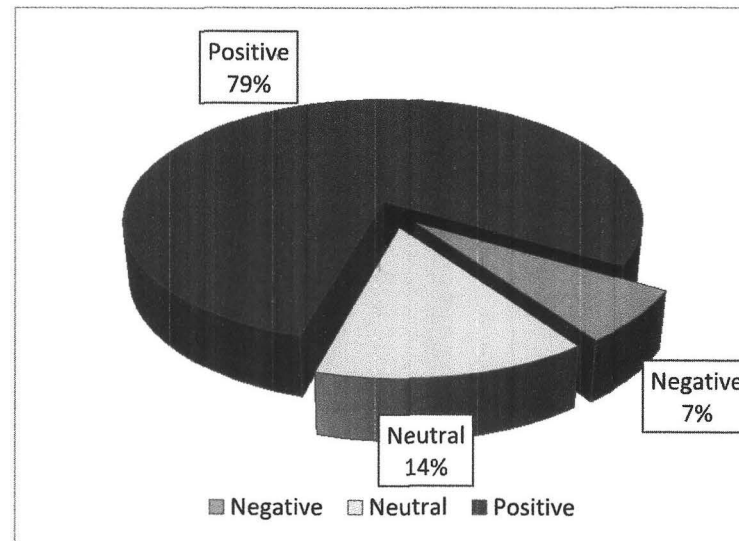
<sup>1</sup> Sumber: Kliping Berita Pertanian yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, 2021

## 2.2 Kategori Nilai Berita Media Cetak

Selain pengelompokan berdasarkan subyek, pemberitaan di media cetak pada periode tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori positif, negatif, dan netral. Pemberitaan digolongkan menjadi kategori positif jika judul dan isi berita dapat memberikan pencitraan positif bagi Kementerian Pertanian dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sektor pertanian. Sedangkan pemberitaan dikategorikan negatif jika memberikan pencitraan yang sebaliknya dan netral jika pemberitaan berimbang atau tidak bersentimen secara khusus terhadap Kementerian Pertanian.

Berdasarkan penggolongan dimaksud, dari sejumlah berita dan opini di media cetak selama periode 1 – 31 Juli 2021 di atas, terdapat 3 kategori nilai berita (sentimen) sebagaimana tersaji dalam Grafik 2;

1. Berita bernilai positif sebanyak 350 atau 79%.
2. Berita bernilai negatif sebanyak 30 atau 7%.
3. Berita bernilai netral sebanyak 63 atau 14%.



Grafik 2. Kategori Nilai Berita di Media Cetak



### III. ANALISIS MEDIA ELEKTRONIK /TELEVISI (TV)

#### 3.1. Monitoring Media Televisi

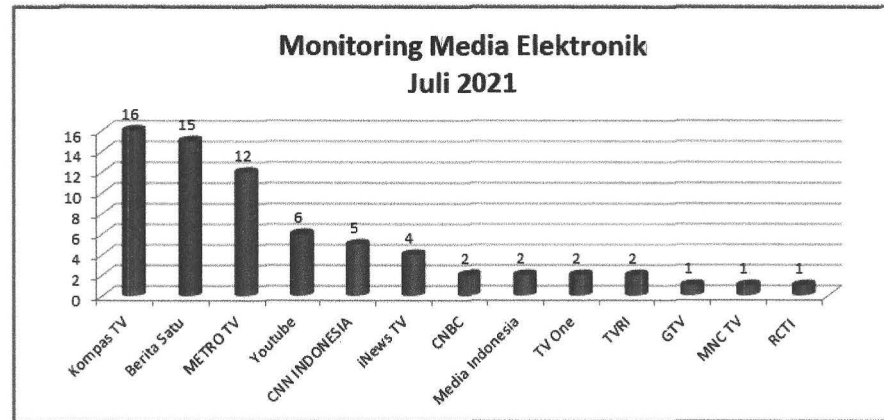
Hasil monitoring berita pertanian di media elektronik TV selama bulan Juli 2021, yang proses untuk mendapatkan informasi dan berita dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah ekspos berita pertanian di media televisi Juli 2021

No	Stasiun	Jumlah Ekspos
1	Kompas TV	16
2	Berita Satu	15
3	METRO TV	12
4	Youtube	6
5	CNN INDONESIA	5
6	iNews TV	4
7	CNBC	2
8	Media Indonesia	2
9	TV One	2
10	TVRI	2
11	GTV	1
12	MNC TV	1
13	RCTI	1
	TOTAL	69

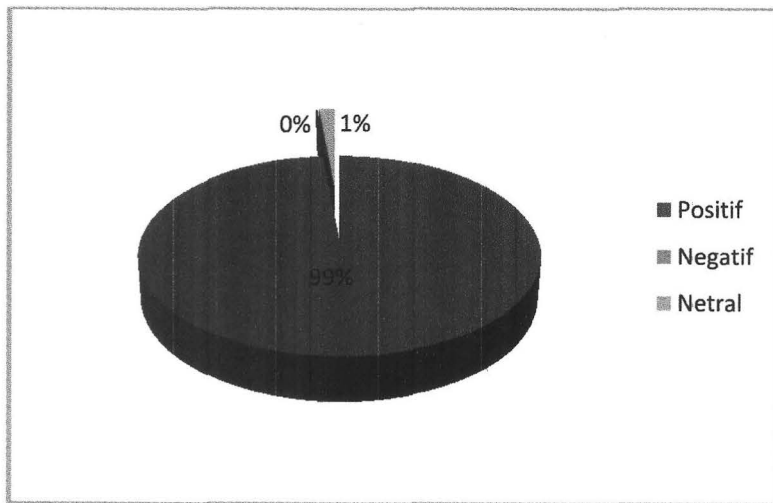
- Kegiatan monitoring pemberitaan di media elektronik (Televisi/TV) telah dilakukan di 14 stasiun TV. Selama bulan Juli 2021, sejumlah 69 ekspos pemberitaan.
- Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah ekspos terbesar berita pertanian terdapat di stasiun Kompas TV (16). Hal ini dikarenakan, banyaknya pemberitaan pada berbagai acara yang ditayangkan di stasiun tersebut. Sedangkan pemberitaan terbanyak selanjutnya adalah di Berita Satu (15).

Grafik 3. Monitoring Pemberitaan Kementerian Pertanian di 14 Stasiun TV



### 3.2. Kategori Nilai Berita di Televisi

Paparan rinci dari media televisi seputar isu pertanian akan dijabarkan dalam bentuk diagram kecenderungan isu. Ada tiga jenis kecenderungan pada tiap isu, yaitu kecenderungan positif, kecenderungan negatif, dan netral. Kecenderungan positif ialah isi dari isu yang dikabarkan tidak menyangkut cerita keburukan, namun sebaliknya memaparkan hal yang baik, dari maupun terhadap Kementerian Pertanian atau pemangku kepentingan. Kecenderungan negatif ialah isu mengabarkan tentang hal-hal yang buruk maupun yang berakibat buruk bagi Kementerian Pertanian atau *stakeholders* (pemangku kepentingan). Kemudian isu yang netral ialah paparan yang tidak mengabarkan keburukan atau kebaikan atas pihak yang berkepentingan atau berita yang berimbang antara berita yang positif dan negatif, terkait bagi Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan.



Berdasarkan penggolongan dimaksud, dari 69 jumlah ekspos di 14 media televisi, maka dapat digolongkan sesuai kecenderungan isunya, sebagaimana tersaji pada gambar 3, yaitu terdapat 68 berita berkategori positif (99%) dan 1 berita berkategori netral (1%).

Grafik 4. Kategori Nilai Berita di Televisi



## IV. TOPIK TERSOROT

### 4.1. Topik Tersorot di Media Cetak

Berdasarkan data yang telah dianalisis di media cetak, maka dapat dilihat beberapa isu utama yang tersorot selama bulan Juli 2021, antara lain seperti dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Topik Tersorot di Media Cetak**

NILAI BERITA	SUBSEKTOR	TEMA BERITA
<b>Positif (+)</b>	1. Badan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketahanan Pangan Nasional</li><li>• Penyaluran Bantuan Beras</li><li>• Penyaluran Bansos Beras</li></ul>
	2. Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upaya Pengembangan KUR Pertanian</li><li>• Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi</li><li>• Inovasi Sawah Tadah Hujan</li></ul>
	3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penurunan Permintaan Hewan Kurban</li><li>• Upaya Stabilisasi Perunggasan</li><li>• Persiapan Pelaksanaan Idul Adha</li></ul>
<b>Negatif (-)</b>	1. Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lahan Pertanian Terdampak Hama</li><li>• Lahan Pertanian Terdampak Kekeringan</li></ul>
<b>Netral (N)</b>	1. Badan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pergerakan Harga Bahan Pokok Pangan</li><li>• Polemik Impor Pangan</li></ul>
	2. Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pergerakan Harga Ayam</li></ul>
	3. Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upaya Pengendalian Hama</li></ul>



## IV. TOPIK TERSOROT

### 4.2. Topik Tersorot di Media Elektronik

Berdasarkan data yang didapat dari media elektronik televisi, maka beberapa topik utama yang tersorot pada bulan Juli 2021 antara lain sebagai berikut dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Topik tersorot di media elektronik/Televisi (TV)**

NILAI BERITA	SUBSEKTOR	ISU	STASIUN
Positif	1. Badan Karantina Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kenaikan Nilai Ekspor Pertanian</li></ul>	Berita Satu TV, Kompas TV, CNN Indonesia, iNews TV
	2. Badan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mentan Pastikan Tidak Impor Beras</li></ul>	Berita Satu TV, Kompas TV, CNN Indonesia, iNews TV, RCTI, MNC TV, GTV
	3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan Upayakan Stabilisasi Perunggasan Nasional</li></ul>	Berita Satu TV, Kompas TV
	4. Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi Pemanfaatan KUR</li></ul>	Berita Satu TV, Metro TV, TVRI



## V. TREN ISU TERSOROT

### Ketahanan Pangan Nasional

#### 5.1 Latar Belakang Isu

Ogan Komering Ulu (OKU) Timur siap menjadi lumbung pangan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pertanian melalui pelatihan. Pelatihan diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Para peserta tergabung dalam kelompok tani maupun Gabungan Kelompok Tani yang berada di Kabupaten OKU Timur, dan langsung dipimpin oleh Kepala Bapeltan Lampung, Abdul Roni Angkat. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pertanian sangat penting untuk dilakukan. SDM adalah faktor pengungkit utama dalam peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan produktivitas, tingkatkan dahulu kualitas dan kapasitas SDM pertanian.

Kementerian Pertanian mulai menggerakkan daerah untuk menyerap gabah petani di tengah adanya dinamika harga panen saat ini. “Ada beberapa daerah mengeluh harga gabah jatuh sehingga kita perlu turun lagi gerak di lapangan mensolusi ini,” ujar Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi saat rapat bersama para pemangku kepentingan hari Selasa (6/7) lalu. Dari data petugas informasi pasar, terdapat laporan harga di bawah HPP di sekitar 60 Kabupaten. “Bagi kabupaten yang mengalami harga di bawah HPP mohon segera turun tangan, kita bersama Perpadi, Bulog dan RNI mari mengatasi masalah ini. Bagi perpadi yang kesulitan modal untuk serap gabah kita fasilitasi dengan bank setempat untuk akses KUR. Perlu untuk penyiapan early warning sistem potensi panen. Gerakan brigade panen perlu dilakukan bersama kostraling, Perpadi, Dinas Pertanian dan supporting dari himbara untuk serap gabah.

Potensi bahan pangan yang ada di Indonesia sangat melimpah. Jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi bahan pangan lokal masih cukup banyak. Salah satunya talas. Hanya saja, memang perlu upaya untuk memaksimalkan potensi bahan pangan yang melimpah tersebut di negeri sendiri guna mendorong diversifikasi pangan. Strategi pun pemerintah siapkan dari mulai ketersediaan hingga pasarnya. “Untuk program diversifikasi pangan lokal, kita punya tagline kenyang gak harus nasi, be smart is smart. Ini semua kita usung untuk mengarahkan ke konsumsi pangan lokal kita,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi saat, Rabu (21/7/2021). Dalam program diversifikasi pangan ini berbasis kearifan lokal yang fokus pada satu komoditas per propinsi yang memiliki nilai tambah. Misalnya, ubi kayu, jagung, pisang, sagu dan talas. “Upaya yang kita lakukan dengan dua cara. Pertama dengan pengembangan diversifikasi pangan lokal dengan makan karbohidrat non beras, termasuk. Kedua, pangan pekarangan lestari untuk pangan lokal non beras,” tuturnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah merumuskan lima program pembangunan pertanian. Hal itu untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan lima program tersebut yaitu Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Dukungan Manajemen. “Saya minta kepada seluruh direktur jenderal (dirjen), kepala badan, serta kepala daerah tetap fokus dalam menjalankan program-program pertanian untuk memperkuat sektor pertanian dan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi saat ini, ” ujarnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional tahun 2021 (Musrenbangtan) secara virtual, Rabu 21 Juli 2021. Syahrul menegaskan, di tengah turbulensi ekonomi dan ancaman krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19, Kementan akan terus mengawal dan menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. “Yang tidak boleh salah dan terganggu sama sekali adalah menyediakan dan mengawal ketersediaan pangan bagi 270 juta rakyat Indonesia

Kementerian Pertanian (Kementan) telah merumuskan lima program pembangunan pertanian. Hal itu untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan lima program tersebut yaitu Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Dukungan Manajemen. “Saya minta kepada seluruh direktur jenderal (dirjen), kepala badan, serta kepala daerah tetap fokus dalam menjalankan program-program pertanian untuk memperkuat sektor pertanian dan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi saat ini, ” ujarnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional tahun 2021 (Musrenbangtan) secara virtual, Rabu 21 Juli 2021.



## 5.2 Komentari

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor beras. Selain itu pemerintah juga tidak akan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat. "Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada," ungkap Syahrul, Kamis (8/7/2021), dikutip dari laman *Kementan*. Ia menyebut impor beras dan PPN sembako umum adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan menjadi sebuah isu karena sampai sekarang ini, pemerintah belum pernah merancang untuk menaikkan PPN sembako. "Kalaupun itu ada pasti Menteri Pertanian tahu. Jadi jangan membuat petani resah," sambungnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan ketersediaan Beras nasional saat ini aman dan terkendali meski dalam kondisi pandemi Covid-19 dan juga adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bahkan pemerintah dikatakan tidak pernah ingin memberlakukan pajak pertambahan nilai terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini diungkapkan menteri pertanian Syahrul yasin limpo usai menggelar rapat di dinas ketahanan pangan pemerintah provinsi sulawesi selatan siang tadi. Mantan gubernur sulawesi selatan ini menegaskan ketersediaan Beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor Beras. Hingga saat ini indonesia memiliki cadangan Beras yang cukup banyak baik yang ada pada pengendalian langsung melalui Bulog maupun penanganan pemerintah daerah. Produksi Beras pada masa tanam pertama tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus over stok pada januari 2020 sebesar 7,39 juta ton sementara jumlah konsumsi nasional 14,46 juta ton sehingga akhir juni 2021 terdapat surplus Beras sebanyak 10,29 juta ton.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian berperan penting menggenjot produktivitas pertanian. Hal ini menjadi perhatian utama sekaligus tugas pokok **Kementerian Pertanian** (Kementan) yang dilaksanakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melalui Tiga Pilar yakni penyuluhan, pelatihan dan pendidikan. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus Kementan. Tujuannya agar produktivitas tetap meningkat bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan para petani tetap terjaga. "Salah satu fokus kita meningkatkan kualitas SDM. Dengan SDM yang berkualitas tersebut, kita akan meningkatkan pertanian," kata Mentan Syahrul.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi menegaskan BPPSDMP di garis terdepan dalam pembangunan SDM pertanian melalui Tiga Pilar yakni penyuluhan, pelatihan dan pendidikan harus berjalan seiring dan seimbang dalam mengemban tugas meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian. Pertanian adalah bisnis. Artinya, pertanian harus menghasilkan, harus menguntungkan, maka tugas widyaiswara dan pengelola pelatihan untuk mampu melatih para peserta pelatihan memahami proses bisnis,” kata Dedi Nursyamsi secara virtual kepada peserta pertemuan koordinasi 'Penguatan Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian'. Dia mengharapkan para peserta pelatihan memahami bagaimana mencari modal, bagaimana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dapat menjadi pilihan, juga mengolah lahan hingga menjual hasil produksinya.

Menurut Suwandi puncak panen kedua harga sudah terdampak turun di bawah hpp artinya sistem di hilir belum begitu kuat dibanding tahun lalu sehingga perlu solusi jangka pendek. Sebenarnya hal ini bisa juga menjadi peluang untuk ekspor premium. “Saya minta eksportir yang beminat silahkan masuk,”ujarnya Suwandi pun menyatakan solusi jangka pendek harga jatuh supaya segera turun ke lapangan serap gabah sebagaimana sudah dilakukan di Grobogan dan Brebes. Jangka menengah dengan turunkan losses, dryer diperkuat penggilingan naik kelas jadi semi modern dan super modern. Kemudian jangka panjang sistem logistik, distribusi dan hilirisasi diperbaiki Mohamad Suyanto Direktur SCPP Perum Bulog mengakui adanya kendala saat ini.

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan ketersediaan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan terutama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Musyafak menjelaskan bahwa PPKM Darurat merupakan aturan ketat yang tidak mungkin dilanggar. Hanya saja, kata dia, Kementerian Pertanian memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan pangan nasional.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi optimis program Food Estate di Humbang Hasundutan akan berhasil. Keberhasilan ini menurutnya akan menjadi contoh untuk pengembangan kawasan Food Estate lainnya baik di Sumut atau provinsi lain. Progres pengembangan Food Estate yang paling terlihat pada saat ini adalah tanaman kentang. Setelah pada panen pertama bulan Maret memperoleh sekitar 15 ton per hektare, diperkirakan panen dari tanam kedua jauh lebih baik. Dari sampel yang diambil, terdapat 15-20 umbi pada satu batang tanaman kentang.



### 5.3 Tindak Lanjut

Target pemerintah untuk diversifikasi pangan ini yakni menurunkan konsumsi beras dalam 5 tahun ke depan sampai 2024 sekitar 5 kg perkapita pertahun. Dari 94,9 kg perkapita pertahun menjadi 85,0 kg perkapita pertahun. Beberapa komoditas yang pemerintah dorong peningkatan konsumsi pangan non karbohidrat lain non beras adalah pisang, talas, kentang, sagu, jagung dan ubi kayu. "Talas sendiri kita harapkan konsumsinya meningkat 0,6 kg perkapita pertahun sampai 3,7 kg perkapita pertahun sampai 2024," ujarnya. Agung mengakui, talas berpotensi untuk diversifikasi pangan. Pemerintah telah menyiapkan tiga strategi dalam diversifikasi pangan. Pertama, peningkatan produksi/ketersediaan komoditas talas. Kedua; promosi melalui format peraturan gubernur/bupati/kota, dan media sosial. Ketiga, memperbaiki akses masyarakat terhadap pangan lokal melalui penguatan UMKM, fasilitasi KUR, pendampingan dan branding, serta membuka pasar, baik melalui digital dan market place. "Saya ingin orang nanti mau makan talas, jangan disuruh cabut dan kupas dulu, tapi bisa mendapatkan dalam bentuk frozen talas

meminta agar semua pihak serta kepala dinas, baik di provinsi dan kabupaten atau kota dapat berperan sentral sebagai akselerator sinergitas program Kementerian. Mentan juga meminta mereka agar tetap bekerja dengan semangat tinggi untuk kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani. "Ke depan saya berharap kemajuan pertanian ditentukan oleh hadirnya teknologi, mekanisasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Dengan begitu, dua aspek tersebut nantinya dapat menaikkan kelas pertanian, yaitu menjadi penyangga ekonomi nasional

Mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan utama atau prioritas yang ditetapkan, Kementan telah membuat langkah strategis pendekatan. Langkah tersebut dirumuskan melalui 5 cara bertindak, yaitu peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, pengembangan pertanian modern, serta gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).



# Lampiran





# 5 Program Pembangunan Pertanian untuk Jaga Ketersediaan Pangan Rakyat



Ilustrasi petani Indonesia (Foto: Nusakini)

**SERIKATNEWS.COM** – Kementerian Pertanian (Kementan) telah merumuskan lima program pembangunan pertanian. Hal itu untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan lima program tersebut yaitu Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Dukungan Manajemen.

“Saya minta kepada seluruh direktur jenderal (dirjen), kepala badan, serta kepala daerah tetap fokus dalam menjalankan program-program pertanian untuk memperkuat sektor pertanian dan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi saat ini,” ujarnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional tahun 2021 (Musrenbangtan) secara virtual, Rabu 21 Juli 2021.

Syahrul menegaskan, di tengah turbulensi ekonomi dan ancaman krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19, Kementan akan terus mengawal dan menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. “Yang tidak



boleh salah dan terganggu sama sekali adalah menyediakan dan mengawal ketersediaan pangan bagi 270 juta rakyat Indonesia, ” katanya.

Syahrul juga mengatakan, hal tersebut sesuai dengan pencapaian Prioritas Nasional 1 (PN-1) yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Pencapaian PN-1 tersebut pun terkait dengan Program Prioritas-3 (PP-3) tentang Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP-6 tentang Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Menurut Syahrul, dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan utama atau prioritas yang ditetapkan, Kementan telah membuat langkah strategis pendekatan. Langkah tersebut dirumuskan melalui 5 cara bertindak, yaitu peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, pengembangan pertanian modern, serta gerakan tiga kali ekspor (Grati eks).

“Saya berharap para dirjen dan kepala badan serta jajarannya dapat mengimplementasikan CB 1 – CB5 dengan baik, dan berharap hal ini dapat menjadi bagian-bagian yang terpenting dalam menjalankan program pembangunan pertanian, ” harapnya.

Pada kesempatan ini, Syahrul meminta pula seluruh jajarannya agar tidak menganggap program di Kementan sebatas proyek saja. Namun, harus dapat terus berkelanjutan dan memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pertanian bukan proyek tapi sebuah program yang dibangun dengan tujuan akhirnya adalah menyejahterakan rakyat melalui 3M, yaitu maju, mandiri, dan modern, ” ujarnya.

Menteri Syahrul pun meminta agar semua pihak serta kepala dinas, baik di provinsi dan kabupaten atau kota dapat berperan sentral sebagai akselerator sinergitas program Kementerian. Mentan juga meminta mereka agar tetap bekerja dengan semangat tinggi untuk kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani.

“Ke depan saya berharap kemajuan pertanian ditentukan oleh hadirnya teknologi, mekanisasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Dengan begitu, dua aspek tersebut nantinya dapat menaikkan kelas pertanian, yaitu menjadi penyangga ekonomi nasional, ” tukasnya. (\*)



# Jelang Idul Adha 2021, Kementan Jamin Ketersediaan Pangan Pokok



Jelang Idul Adha 2021, Kementan Jamin Ketersediaan Pangan Pokok

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan pangan menjelang hari raya Idul Adha 2021 tetap terpenuhi. Di tengah pandemi Covid-19, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus Kementan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi ketahanan pangan menjelang lebaran Idul Adha tahun ini.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa bahan-bahan pokok mencukupi dan tidak mengalami kesulitan ataupun mengalami penurunan.

“Untuk ketersediaan pangan menjelang Idul Adha di masa Covid-19 ini, Alhamdulillah, pemerintah sejauh ini masih menjamin ketersediaan bahan pokok penting. Karena ini merupakan perhatian yang selalu kita diskusikan baik di tingkat pusat maupun di daerah,” ujar Harvick di Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Sejauh ini, semua bahan-bahan pokok tersebut telah terdistribusi dengan baik di kalangan masyarakat dari kota besar sampai ke daerah. Harvick pun berharap agar kondisi tersebut dapat terus stabil, tidak hanya saat perayaan Idul Adha saja, tetapi juga di tahun-tahun mendatang.



Pihaknya juga masih terus mencari solusi agar pandemi tidak berpengaruh besar terhadap kestabilan dan kelangsungan hidup masyarakat. “Kondisi yang kita harapkan terus bisa stabil, bahkan mungkin bukan saja sampai Idul Adha dan akhir tahun ini, (tetapi) juga di tahun-tahun mendatang. Karena kita juga masih terus mencari jalan keluar soal mengatasi Covid-19, bagaimana agar jangan sampai Covid-19 ini berpengaruh besar, terus menerus, terhadap kestabilan dan kelangsungan hidup di masyarakat kita,” bebernya.



# Kementan Dukung Peningkatan SDM Pertanian melalui Pelatihan



Kementan Dukung Peningkatan SDM Pertanian melalui Pelatihan

Kegiatan Penguatan Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yang digelar BPPSDMP Kementan, dipusatkan di Bandung yang berlangsung tatap muka (offline) dan daring (online).

JAKARTA - Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian berperan penting menggenjot produktivitas pertanian. Hal ini menjadi perhatian utama sekaligus tugas pokok Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilaksanakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melalui Tiga Pilar yakni penyuluhan, pelatihan dan pendidikan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus Kementan. Tujuannya agar produktivitas tetap meningkat bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan para petani tetap terjaga.

“Salah satu fokus kita meningkatkan kualitas SDM. Dengan SDM yang berkualitas tersebut, kita akan meningkatkan pertanian,” kata Mentan Syahrul.



Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menegaskan BPPSDMP di garis terdepan dalam pembangunan SDM pertanian melalui Tiga Pilar yakni penyuluhan, pelatihan dan pendidikan harus berjalan seiring dan seimbang dalam mengemban tugas meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian.

“Pertanian adalah bisnis. Artinya, pertanian harus menghasilkan, harus menguntungkan, maka tugas widyaswara dan pengelola pelatihan untuk mampu melatih para peserta pelatihan memahami proses bisnis,” kata Dedi Nursyamsi secara virtual kepada peserta pertemuan koordinasi 'Penguatan Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian'.

Dia mengharapkan para peserta pelatihan memahami bagaimana mencari modal, bagaimana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dapat menjadi pilihan, juga mengolah lahan hingga menjual hasil produksinya.

“Keberhasilan pelatihan tidak diukur semata berapa jumlah petani atau penyuluh yang sudah dilatih, tapi bagaimana hasil pelatihan tersebut diterapkan oleh petani dan penyuluh,” kata Dedi Nursyamsi.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Leli Nuryati menambahkan bahwa Pelatihan Pertanian merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam peningkatan SDM pertanian bagi aparatur negara dan non aparatur, para petani dan praktisi pertanian.

“Pelatihan pertanian tidak hanya ditujukan bagi aparatur, juga non aparatur seperti kepada petani milenial, kelompok tani dan Gapoktan dan KWT (Kelompok Wanita Tani) semua harus kita lakukan untuk peningkatan produktifitas,” katanya.

Sebagai bagian dari pelatihan, kata Leli Nuryati, disusun pula rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Penyuluhan Pertanian sebagai standar kompetensi membangun aparatur penyuluhan pertanian. Hal itu terkait erat dengan sertifikasi bagi 2.168 tenaga honor penyuluhan (THL TBPP) agar lulus menjadi Aparatur Sipil Negara - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-P3K).

Puslatan BPPSDMP pada kegiatan tersebut juga membahas program lingkungnya dan konsolidasi internal bagi Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) pada 18 kabupaten di enam provinsi.



# Kementan Komitmen Jamin Ketersediaan Pangan dan Patuhi Prokes



Kementan Penyegehan Kantor Pusat Kementan dibatalkan setelah Satgas Covid-19 DKI Jakarta mendapatkan penjelasan.

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan ketersediaan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan terutama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Musyafak menjelaskan bahwa PPKM Darurat merupakan aturan ketat yang tidak mungkin dilanggar. Hanya saja, kata dia,

Kementerian Pertanian memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan pangan nasional. Sebelumnya, kantor pusat Kementan diberitakan disegel oleh Satgas Covid-19 DKI-Jakarta karena diduga melanggar protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.



Namun, tak berselang lama, penyeselangan itu dibatalkan setelah Satgas mendapatkan penjelasan dan melakukan pengkajian ulang terkait tugas dan fungsi Kementan dalam hal ketersediaan pasokan pangan nasional.

"Kementan adalah Kementerian yang punya tanggung jawab besar untuk mengamankan ketersediaan pangan nasional. Dan, itu perlu koordinasi, monitoring dan sebagainya, sehingga tidak mungkin di Kementan itu lockdown 100%," kata Musyafak, pada Kamis (8/7/2021) malam.

Musyafak mencontohkan, para pegawai di Badan Karantina Pertanian tetap masuk kantor, meski hanya 25%. Alasannya, Karantina adalah termasuk unit esensial yang memiliki tugas penting dalam pelayanan perkarantinaaan pada masyarakat.

"Barantan itu masuk tapi tidak lebih dari 25%, sehingga sebetulnya sudah menerapkan protokol Covid-19 dan sekarang segelnya juga sudah dilepas. Semua sudah clear," katanya. Sebagai informasi, jumlah pegawai Kementan yang terpapar virus Covid-19 adalah sebesar 200 orang. Jumlah ini tersebar di unit unit kerja pertanian bukan hanya di kantor pusat.

"Jadi bukan hanya di kantor pusat saja. Jumlah yang terpapar itu ada dimana-mana. Jadi sekali lagi, terkait PPKM ini, Pak Sekjen sudah membuat surat edaran, di situ dijelaskan aturan ketat dan disiplin proses.

Untuk kantor yang pegawainya banyak terpapar dan tugasnya tidak esensial maka lockdown tiga hari, walaupun masuk, maksimal 25%," tegasnya. Pemerintah telah menetapkan PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. PPKM tersebut dikhususkan bagi di Pulau Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat agar penyebaran Covid-19 di Tanah Air dapat segera diatasi. Dengan kerja sama yang baik dari seluruh rakyat Indonesia, menurut Presiden Jokowi penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan dengan.

Oleh karena itu, Musyafak menjelaskan pihaknya terutama Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Menurut Musyafak, Sekjen Kasdi Subagyono langsung memberi klarifikasi, menjelaskan secara intens kepada Satgas covid-19 DKI Jakarta disertai data dukung. "Pak Sekjen sudah menjelaskan kepada Tim Satgas dan Pak Sekda,akhirnya stiker lockdown sudah dilepas," tutupnya. (RO/OL-09)



# Menteri Pertanian Pastikan Stok Pangan Aman Ditengah Pandemi Dan PPKM Darurat

MAKASSAR, KOMPASTV - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan ketersediaan Beras nasional saat ini aman dan terkendali meski dalam kondisi pandemi Covid-19 dan juga adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bahkan pemerintah dikatakan tidak pernah ingin memberlakukan pajak pertambahan nilai terhadap sembako umum yang di konsumsi masyarakat.

Hal ini di ungkapkan menteri pertanian Syahrul yasin limpo usai menggelar rapat di dinas ketahanan pangan pemerintah provinsi sulawesi selatan siang tadi.

Mantan gubernur sulawesi selatan ini menegaskan ketersediaan Beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor Beras.

Hingga saat ini indonesia memiliki cadangan Beras yang cukup banyak baik yang ada pada pengendalian langsung melalui Bulog maupun penanganan pemerintah daerah.

Produksi Beras pada masa tanam pertama tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus over stok pada januari 2020 sebesar 7,39 juta ton sementara jumlah konsumsi nasional 14,46 juta ton sehingga akhir juni 2021 terdapat surplus Beras sebanyak 10,29 juta ton.

Selain itu untuk masa tanam kedua tahun 2021 juga sudah dimulai dan panen pada pertengahan tahun sehingga berpotensi menambah stok pangan nasional. Kementerian pertanian menargetkan produksi Beras pada masa tanam kedua sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus Beras di awal juli 10,29 ton sementara konsumsi Beras 14,91 juta ton sehingga akhir desember 2021 diperkirakan terdapat surplus stok Beras sebesar 9,63 juta ton.

Adapun stok Beras saat ini diperum Bulog dalam bentuk cadangan Beras pemerintah sebesar 1,37 juta ton diatas batas aman 1 juta ton sementara stok Beras komersial 13,969 ton. Penyaluran Beras untuk kepentingan stabilisasi harga pasokan dan kebencanaan perbulan 80 ribu ton maka stok Beras aman sampai dengan akhir tahun.

Adapun mengenai isu PPN sembako pihaknya menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah ingin memberlakukan pajak pertambahan nilai terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat.

Menurutnya ini adalah pikiran pikran yang ada disebagian pihak dan menjadi sebuah isu karena sampai sekarang ini pemerintah belum pernah merancang untuk kenaikan PPN



# Stok Pangan Cukup, Pemerintah Tidak Akan Impor Beras



**JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi** memastikan bahwa stok barang kebutuhan pokok aman dan harganya stabil. Terkait stok beras yang juga aman, dia menegaskan tidak akan ada impor beras dalam waktu dekat ini. "Hasil panen beras tahun ini diprediksi akan lebih baik dari tahun lalu," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), diprediksi bahwa hasil panen beras tahun 2021 akan mencapai 33 juta ton. Seperti diketahui, realisasi hasil panen beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton.

"Selain itu, saat ini stok beras yang ada di Perum Bulog mencapai 1,39 juta ton. Terdiri dari 1,37 juta stok CBP (cadangan beras pemerintah) dan 14.765 ton stok komersial," paparnya.

Lutfi mengatakan, penyaluran beras Bulog untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) mencapai 80 ribu ton per bulan. Ketahanan stok juga diperkirakan setidaknya cukup untuk 12 bulan (satu tahun) ke depan.



“Kalau kita mengikuti alur dari pemikiran ini, kita bisa pastikan bahwa tidak ada impor dan ketersediaan di Bulog juga cukup. Jadi saya rasa bahwa ini bagus, stok nasional juga baik dan saya tidak ada ekspektasi sama sekali untuk mengimpor beras dalam waktu yang dekat ini,” pungkasnya.





**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**Biro Humas dan Informasi Publik**

[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)

